



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI  
DAN TENAGA KERJA**

JL. Jend. A. Yani Km.1 Paringin Kota – Kabupaten Balangan Kode Pos 71611  
Telp/Faks. (0526) 2028114 email : dpmpstsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 188.46/069 / SK / DPMPSTPTTK / TAHUN 2023**

**TENTANG :**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 188.46/033/SK/DPMPSTPTTK/TAHUN 2021 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN DINAS  
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.




## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal 01 September 2023

**KEPALA DINAS,**



**Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**  
NIP. 19710228 199702 1 002



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI**  
**DAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR :188.46/ /DPMPTSPTTK-BLG/TAHUN**  
**2023**  
**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR**  
**KINERJA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN**  
**TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**  
**TAHUN 2021- 2026**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	<p>Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)</p> <p>Untuk mengetahui realisasi investasi pertahun</p> <p>Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya</p>	Kepala SKPD	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terserap	<p>Mengetahui sejauh mana tingkat penyerapan Tenaga Kerja</p> <p>Penduduk yang Bekerja/Angkatan Kerja x 100 %</p>	Kepala SKPD	SAKERNAS BPS

3	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana kemudahan perizinan yang diberikan dalam pelaksanaan berusaha/berinvestasi di Kabupaten Balangan  Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kinerja PTSP serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh kementerian Investasi dan/ atau Nilai Survey Kepuasan terhadap layanan Perizinan	Kepala SKPD	Kementerian Investasi / BKPM
4.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan terlindungi sesuai dengan hak hak nya.  Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar (PU atau BPU) x 100%	Kepala SKPD	Wajib Lapo Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA**



**Dr. AKHIRANI, S.Pd., M.AP  
NIP. 19710228 199702 1 002**



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN  
 BALANGAN  
 NOMOR :188.46/ /DPMPTSPTTK-  
 BLG/TAHUN 2023  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR  
 KINERJA SKPD PENANAMAN MODAL,  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA  
 KERJA KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Untuk mengetahui Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Bidang Sekretariat	LHE Sakip
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	Untuk mengetahui sejauhmana kondisi sarana dan prasarana penunjang SKPD		Data Aset

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	Mengetahui sejauhmana permintaan tenaga kerja / lowongan kerja dapat dipenuhi  Jumlah lowongan yang terpenuhi/Jumlah lowongan terdaftar x 100%	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Informasi Pasar Kerja



2	Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja dari Realisasi Investasi	Jumlah Tambahan Tenaga Kerja dari Investasi Baru	Mengetahui sejauhmana dampak realisasi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja baru  Jumlah Tenaga Kerja Baru berdasarkan rilis LKPM	LKPM
---	---	--	---	------

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi Tahun N / Jumlah Tenaga kerja Terdaftar (Peserta pelatihan dan Layanan Antar Kerja) Tahun N x 100%	Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	<p>Terfasilitasinya Perselisihan hubungan industrial yang timbul di perusahaan</p> <p>dengan Terfasilitasinya Perselisihan hubungan industrial yang timbul di perusahaan maka kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar</p> <p>Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi _____ X 100 Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk dan tercatat</p>		



NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Warga Transmigrasi yang Terampil	Persentase warga Transmigrasi yang Terampil	$\frac{\text{Jumlah Warga yang terampil}}{125 \text{ Orang}} \times 100\%$	Bidang Transmigrasi	
2	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh Warga Transmigrasi	$\frac{LK}{LT} \times 100\%$		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal / Jumlah Permintaan data dan informasi yang terpenuhi x 100%	Bidang Pengaduan, Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	Mengetahui sejauhmana tindaklanjut atas pengaduan yang masuk  Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah pengaduan yang terselesaikan x 100%		



NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	Mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan  Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	Mengetahui sektor investasi baru yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan iklim investasi	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen Potensi
2	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Mengetahui sejauhmana minat investasi/rencana investasi di Kabupaten Balangan  Nilai Persetujuan Investasi dari pendaftaran NIB		Data NIB/ Perizinan Berusaha
3	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Mengetahui sejauhmana kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kewajibanya  Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM/ Jumlah Pelaku usaha yang wajib melaporkan x 100%		LKPM



NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik		Sub Bagian Umum & Kepegawaian	SILKA
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik			
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan			
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik			
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik			

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	



NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		Sub Bagian Keuangan	

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pengintegrasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Online	Mengetahui jumlah layanan izin yang terintegrasi secara online	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha	
2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan		
3	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Perizinan Non Berusaha)	Jumlah izin seusi SOP/ Jumlah permohonan perizinan x 100%		



NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Perizinan, Jumlah Pelayanan Konsultasi Perizinan dan Pengaduan yang tertangani	Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Perizinan	Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan dan Non Perizinan PM

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Updating Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Mengetahui progress data dan informasi penanaman modal	Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi	Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terpenuhi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi / Jumlah permintaan data dan informasi x 100%	Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan	Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan
2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Mengetahui Jumlah data dan informasi perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		



NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (berinvestasi)	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berusaha	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Data Izin
2	Tersedianya Kebijakan Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi	Mengetahui Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	Mengetahui jumlah dokumen promosi penanaman modal	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal	
2	Terlaksananya Promosi Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Mengetahui jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penyusunan LKPM	Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
2	Terlaksananya Pengawasan Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Pemantauan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan		



NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Perusahaan/ Pemberi Kerja dengan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak / Jumlah Perusahaan terdaftar x 100%	Sub Koordinator Hubungan Industrial	WLKP
2	Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perkara/Pengaduan HI yang difasilitasi Penyelesaiannya	Jumlah perkara yang difasilitasi / Jumlah perkara masuk x 100%		HI

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya LPKS yang Berkualitas	Jumlah LPKS yang melaksanakan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	Mengetahui Jumlah LPKS yang melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan	Sub Koordinator Pelatihan Kerja dan Kelembagaan	
2	Terselenggaranya Konsultasi Produktivitas bagi Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas Wirausaha Kecil	Jumlah Wirausaha yang meningkat produktivitasnya / Jumlah Wirausaha binaan x 100%		
3	Terselenggaranya Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	Mengetahui jumlah tenaga kerja yang kompeten berdasarkan hasil Sertifikasi BNSP		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Efektif	Persentase Informasi Pasar Kerja yang Disebarluaskan	Jumlah IPK yang disebarluaskan / Jumlah Lowongan terdaftar x 100	Sub Koordinator Penempatan Tenaga	



2	Tersedianya LPTKS yang Berperan Menyalurkan Tenaga Kerja	Persentase LPTKS yang Aktif	Jumlah LPTKS yang melakukan rekrutmen / Jumlah LPTKS Terdaftar x 100%	Kerja	
3	Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Balangan	Persentase Kerjasama antar Kerja	Jumlah perusahaan yang difasilitasi / Jumlah Perusahaan yang menyampaikan lowongan x 100%		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Keseimbangan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	Rasio Persediaan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	Jumlah kesempatan kerja / Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	banyaknya warga transmigrasi yang diikutkan dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan	Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Transmigrasi	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN,

  
**Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**  
 NIP. 19740228 199702 1 002